

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran penyedia barang/jasa pemerintah terhadap mekanisme daftar hitam pengadaan barang/jasa di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap aktor – aktor pengadaan sektor publik di Kota Bandung menggunakan 10 indikator perilaku etis berintegritas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran yang masih dilakukan oleh pengada dan petugas pengadaan di Kota Bandung ada 3 yaitu:

1. Terdapat potensi korupsi. Hal ini didukung dengan masih terjadinya favoritism dalam proses pengadaan di Kota Bandung.
2. Melaksanakan metode yang tidak tepat dalam menjalankan kebijakan. Dibuktikan dengan masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengada dan petugas ULP atas mekanisme daftar hitam.
3. Terjadi manipulasi data menggunakan ICT. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat manipulasi data dalam proses pengadaan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat tiga bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengada dan Unit Layanan Pengadaan sebagai aktor-aktor pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satunya adalah belum maksimalnya pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan. Kriteria melaksanakan metode yang tidak tepat dalam menjalankan kebijakan ini masih belum terpenuhi dengan alasan kendala dalam pemilihan penyedia. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pembuatan sistem penilaian kinerja bagi pengada barang/jasa pemerintah. Sistem ini dapat koordinasikan oleh LKPP sebagai lembaga pembuat kebijakan, agar dapat diterapkan kepada seluruh pengada yang ada di Indonesia. Sistem ini dapat dikembangkan oleh masing-masing LPSE. Pengada yang telah menyelesaikan proyek otomatis akan mendapatkan penilaian dari PPK, LKPP, dan masyarakat. Penilaian dapat dilakukan secara online dengan mengakses website LPSE.

Sistem penilaian tersebut termasuk di dalamnya adalah umpan balik seluruh proyek yang telah dijalankan oleh penyedia, pernah atau tidak melakukan pelanggaran, dan penilaian publik setelah proyek selesai dilakukan. Sistem penilaian kinerja pengada akan membantu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan dalam melakukan pemilihan penyedia dengan lebih efektif dan efisien sehingga pelanggaran pengada yang disebabkan oleh kinerja yang kurang baik dapat diatasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Bekkers, Victor, Hein van Duinvenboden, and Marcel Thaens. 2006. *Information and Communicatio Technology and Public Innovation*. Amsterdam: IOS Press.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Creswell, John W. 2014. *Research Design 4TH Edition* . London: Sage
- Cox III, Raymond W. 2009. *Ethics and Integrity in Public Administration*. New York: M.E. Sharpe.
- Dutelle, Aric W. 2011. *Ethics for the Public Service Professional*. London: CRC Press .
- Kolthoff, Emile, Leo Huberts, dan Hans van den Heuvel. 2007. "The Ethics of New Public Management: Is Integrity at Stake?" *Winter 2006/2007 issue* 8.
- KPK. t.thn. *Mengenal & Memberantas Korupsi*. Jakarta: Komisi Pmeberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Meynhardt, Timo, Steven A. Brieger, Pepe Strathoff, Stefen Anderer, Anne Baro, Caroline Hermann, Jana Kollat, Paul Neuman, Steffen Bartholomes, dan Peter Gomez. 2017. "What Does It Mean to Create Value in the Public Sector?" *Public Value Performance* 138-141.
- Mlinga, Ramadhan S. t.thn. "Ethics in Public Pocurement: A Missing Link in the Edication and Training of Construction Industry Practioners." *Public Procurement Regulatory Authority (PPRA)* 3.
- Priyono, B. Herry. 2018. *Korupsi. Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: Gramedia.
- Sermiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Silalahi, Ulber. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Yin, Robert K. 2011. *Quaitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.

Artikel Jurnal

- Transparency International. 2013. *Transparency International*. Diakses Maret 18, 2019. <https://www.transparency.org/cpi2013/results>.
- Hutchings, Alice, dan Penny Jorna . 2015. "Misuse of information and communications technology within the public sector." *Trends & issues in crime and criminal justice* 2.
- Martini, Maria. 2013. "Blacklisting in Public Procurement." *Transparency International* 3.
- OECD. 2016. "Preventing Corruption in Public Procurement." 11-26.
- Park, Chul Hyun, dan Koomin Kim . 2019. "E-government as an anti-corruption tool: panel data analysis across countries." *Internasional Review of Administrative Science* 3.
- Rachmawati, Tutik, dan Caroline Gratia Sinuraya. 2016. "Does ICT's Matter For Corruption?" *Asia Pasific Fraud Journal* 50.
- Rowley, Jennifer. 2014. *The SAGE Encyclopedia of Action Research*. London: SAGE Publication.
- Whitton, Howard. 2001. "Implementing effective ethics standards in government and the civil service." *Transparency International* 5.

Internet

- Commission, Australian Criminal Intelligence. 2018. *Australian Criminal Intelligence Commission*. 17 July. Diakses May 5, 2019. <https://www.acic.gov.au/about-crime/organised-crime-groups/public-sector-corruption>.
- Hasanah, Sovia. 2016. *Hukumonline*. 22 Desember. Diakses Mei 7, 2019. .
Hasanah. 'Bentuk-bentuk maladministrasi'.
[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58292617134da/bentuk-bentuk-maladministrasi,\(07.05.2019\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58292617134da/bentuk-bentuk-maladministrasi,(07.05.2019)).
- Jennett, Victoria. 2006. *U4 Anti Corruption Resources Centre*. 22 Desember. Diakses Mei 1, 2019. <https://www.u4.no/publications/using-blacklisting-against-corrupt-companies.pdf>.
- KBBI. t.thn. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses Mei 7, 2019. <http://www.kbbi.com>.

KPK. 2019. *KPK RI*. Diakses Mei 7, 2019. <https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/infografis/pengertian-konflik-kepentingan>.

Todd, Kelly J. 2016. *Forensic Strategic Solution*. 28 October. Diakses May 6, 2019. <https://www.forensicstrategic.com/blog/why-corruption-always-requires-a-conflict-of-interest>.

Dokumen

Republik Indonesia. 'Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah'

Republik Indonesia. 'Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah'

Republik Indonesia. 'Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah'

Republik Indonesia. 'Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.'

Republik Indonesia. 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.'

Sumber lainnya

Inspektorat. 2019. *Membangun Budaya Anti Fraud dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat*. Bandung, 25 April.

LKPP. Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.